

**EFEKTIVITAS KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA
DALAM MENGHADAPI ISU TERORISME DI KAWASAN INDONESIA-
AUSTRALIA**

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Strata-1*

SKRIPSI



Oleh:

Dwi Indah Herma Saputri

202910360311165

**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang
2023**

EFEKTIVITAS KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA
DALAM MENGILADAPI ISU TERORISME DI KAWASAN INDONESIA-
AUSTRALIA'

Diajukan Oleh :

Dwi Indah Herma Saputri
201910360211165

Telah disetujui
Pada hari / tanggal, *Semn / 3 Juli 2023*

Pembimbing I



Hamdan Nafiatur Rosvida, M.Si.

Pembimbing II



Dedik Fitra Suhermanto M.Hub.Int

Wakil Dekan I



Najafuddin Kharur Rijal, M. Hub. Int.

Ketua Program Studi
Hubungan Internasional



Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Dwi Indah Herma Saputri
201910360311165

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
L U L U S

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S-1) Hubungan Internasional
Pada hari Jumat, 10 Juni 2023
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. Hamdan Nafiatur Rosyida, M.Si. ()
2. Dedik Fitra Suhermanto, M.Hub.Int ()
3. Muhammad Subhan Setowara, M.A ()
4. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt. ()

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

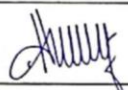



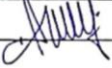


Najamuddin Khairi Rijal, S.IP., M. Hub. Int.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Indah Herma Saputri
NIM : 201910360311165
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Efektivitas Kerjasama Indonesia-Australia dalam Penanggulangan Terorisme di Kawasan Indonesia-Australia

Pembimbing : 1 Hamdan Nafiatur Rosyida, S.S, M. Si.
2. Dedik Fitra Suhermanto, S.IP, M. Hub. Int.

Kronologi Bimbingan :

Tanggal	Paraf Pembimbing		Keterangan
	Pembimbing I	Pembimbing II	
29 Maret 2023			Revisi fokus batas waktu penelitian
3 April 2023			Revisi latar belakang, format TA, dan penambahan data terbaru
10 April 2023			ACC Draft TA

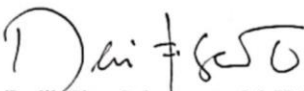
Malang, 3 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Hamdan Nafiatur Rosyida, M. Si


Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub. Int



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dwi Indah Herma Saputri
NIM : 201910360311165
Jurusan : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :
"Efektivitas Kerjasama Indonesia-Australia dalam Penanggulangan Terorisme di Kawasan Indonesia-Australia" adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Juli 2023
Yang Menyatakan,


Dwi Indah Herma Saputri

ABSTRAK

Dwi Indah Herma Saputri, 2023, 201910360311165, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Efektivitas Kerjasama Bilateral Indonesia-Australia dalam Menghadapi Isu Terorisme di Kawasan Indonesia-Australia, Pembimbing I: Hamdan Nafiatur Rosyida, M.Si., Pembimbing II: Dedik Fitra Suhermanto, M.Hub., Int.

Aksi terorisme menjadi perang psikologis yang selalu diikuti oleh kekerasan, intimidasi dan ketakutan terhadap target sasaran teror. Terorisme menjadi isu yang sangat penting untuk ditanggulangi oleh Indonesia dan Australia dalam menjaga keamanan kawasan. Dari peristiwa Bom Bali 2002 kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam menanggulangi tindak kejahatan terorisme dimulai. Dalam artikel ini membahas bagaimana dinamika kerjasama Hubungan Bilateral Indonesia-Australia dilihat dari Regional Security Complex yang mempengaruhi kerjasama penanggulangan terorisme Indonesia-Australia pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terfokus pada kerjasama Kepolisian Australian Federal Police (AFP) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga bagaimana pengupayaan kerjasama antara Indonesia dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dalam memaparkan upaya-upaya Indonesia-Australia dalam menanggulangi terorism dikawasannya dimana data-data yang diperoleh secara pustaka. Dari penelitian ini dapat disimpulkan dinamika hubungan Indonesia-Australia sering mengalami pasang surut yang cukup serius, namun demikian kerjasama antara keduanya tetap dilakukan untuk menjaga keamanan kawasan dari ancaman terorisme. Peningkatan terorisme yang terjadi 5 tahun terakhir membuat Indonesia-Australia meningkatkan kerjasamanya dalam penanggulangan terorisme. Pada kerjasama penanggulangan terorisme antara Indonesia-Australia di era Pemerintahan Joko Widodo periode II, kerjasama banyak dilakukan dengan cara berdialog dan seminar terkait isu-isu terorisme. Dari kerjasama antara Indonesia-Australia dalam penanganan terorisme ini menjadi salah satu aspek amity yang ditunjukkan walau diwarnai dengan konflik diantara keduanya.

Malang, 10 Juli 2023

Penulis



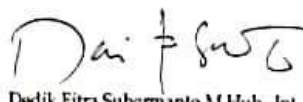
Dwi Indah Herma Saputri

Pembimbing I



Hamdan Nafiatur Rosyida, M.Si.

Pembimbing II



Dedik Fitra Suhermanto, M.Hub., Int

ABSTRACT

Dwi Indah Herma Saputri, 2023, 201910360311165, University of Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Science, Department of International Relations, The Effectiveness of Indonesia-Australia Bilateral Cooperation in Dealing with the Issue of Terrorism in the Indonesia-Australia Region, Advisor I: Hamdan Nafiatu Rosyida, M.Si, Advisor II: Dedik Fitra Suhermanto, M.Hub., Int

Acts of terrorism become a psychological war which is always followed by violence, intimidation and fear of terror targets. Terrorism is a very important issue to be tackled by Indonesia and Australia in maintaining regional security. From the 2002 Bali Bombing incident, cooperation between Indonesia and Australia in tackling acts of terrorism began. This article discusses how the dynamics of cooperation in the Indonesia-Australia Bilateral Relations are seen from the Regional Security Complex which influenced the Indonesia-Australia cooperation in combating terrorism in President Joko Widodo's administration which focused on the cooperation of the Australian Federal Police (AFP) and the Indonesian National Police (Polri) as well how cooperation efforts between Indonesia are carried out. The type of research used is descriptive in explaining the efforts of Indonesia-Australia in tackling terrorism in the region where the data is obtained from the literature, carried out to maintain regional security from the threat of terrorism. The increase in terrorism that has occurred in the last 5 years has made Indonesia and Australia increase their cooperation in countering terrorism. In the second period of cooperation in combating terrorism between Indonesia and Australia during the reign of Joko Widodo, much of the cooperation was carried out in the form of dialogue and seminars related to terrorism issues. From the collaboration between Indonesia and Australia in handling terrorism, this is an aspect of charity that is shown even though it is colored by conflict between the two.

Malang, 10 July 2023

Writer



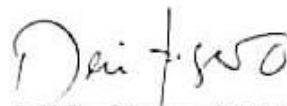
Dwi Indah Herma Saputri

Advisor I



Hamdan Nafiatu Rosyida, M.Si

Advisor II



Dedik Fitra Suhermanto, M.Hub., Int

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SWT yang telah membawa cahaya Islam kedalam dunia ini dan menjadi penutan bagi setiap umatnya hingga akhir zaman.

Setelah melewatinya proses kerja keras, penyusunan skripsi berjudul **“EFEKTIVITAS KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENGHADAPI ISU TERORISME DI KAWASAN INDONESIA-ASUSTRALIA”** akhirnya bisa terselesaikan. Selain sebagai syarat mendapatkan gelar SI, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat meembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hubungan internasional. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan doanya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Beberapa pihak tersebut antara lain:

1. Kepada ibu tercinta Hikmawati yang terus memberikan dukungan dan doa serta tidak lelah memberikan kepercayaanya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ayah tercinta Hermintoyo, terimakasih atas waktu singkatnya yang sangat berharga dalam mencintai dan menyayangi penulis serta sudah menjadi teladan dan penyemangat bagi penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.
3. Saudari dan saudara saya Nencylia Mahmintari, M. Michael Rizky, dan Septyan Basudewa yang telah memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Hamdan Nafiatur Rosyida, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan tenaga, pikiran, dan waktunya dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
5. Dedik Fitra Suhermanto, M.Hub.Int. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan tenaga, pikiran, dan waktunya dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh jajaran dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang dan staff dari tim Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis sebagai mahasiswa.
7. Dita Ayu Nuraeni, Rahmatya Ainunnisa, LM. Raffi Rezky, Doni Abhi Maulana, dan Zulfikar Ali Osman sebagai sahabat semasa kuliah yang memberikan semangat dan waktunya untuk mendengarkan semua keluh kesah penulis, juga sebagai teman bertukar pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Anugerah Dista Putra Anggoro, sebagai partner yang menemani penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan saya yakni Farrell Martiza, Muhammad Feryzal, Rafi Maulana, Bintang Maulana, dan Muhammad Amin, yang memberikan dukungan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih,

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Malang, 15 September 2023



Dwi Indah Herma Saputri

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PLAGIASI.....	xi
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Konsep	5
Terorisme	5
Regional Security Complex Theory.....	5
C. Metode Penelitian	9
D. Pembahasan	10
Perkembangan Terorisme Era Joko Widodo	10
Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Aksi Preventif terhadap Terorisme	11
E. Simpulan.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	20



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL

hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : E.6.e/134/II/FISIP-UMM/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Dwi Indah Herma Saputri
NIM : 201910360311165
Judul Skripsi : Efektivitas Kerjasama Bilateral Indonesia-Australia dalam Menghadapi Terorisme Di Kawasan Indonesia-Australia
Dosen Pembimbing : 1. Hamdan Nafiatur Rosyida, M.Si.
 2. Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub.Int.

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	Tugas Akhir
	15%
Similarity	7%

**) Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.*

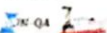
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.

Malang, 31 Juli 2023

Ka. Prodi Hubungan Internasional,



Dr. Dya Estu Kurniawati, M.Si



Kampus I
Jl. Burhanung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 351 213 (Kuning)
F: +62 341 850 435

Kampus II
Jl. Berozangun, Sutan No 188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 251 149 (Kuning)
F: +62 341 562 080

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 404 318 (Kuning)
F: +62 341 810 435
E: webmaster@umm.ac.id

**Efektivitas Kerjasama Bilateral Indonesia-Australia dalam Menghadapi Isu Terorisme
di Kawasan Indonesia-Australia**

Dwi Indah Herma Saputri¹

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

¹E-mail: dwi.indahermasaputri@gmail.com

Abstrak

Aksi terorisme menjadi perang psikologis yang selalu diikuti oleh kekerasan, intimidasi dan ketakutan terhadap target sasaran teror. Terorisme menjadi isu yang sangat penting untuk ditanggulangi oleh Indonesia dan Australia dalam menjaga keamanan kawasan. Dari peristiwa Bom Bali 2002 kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam menanggulangi tindak kejahatan terorisme dimulai. Dalam artikel ini membahas bagaimana dinamika kerjasama Hubungan Bilateral Indonesia-Australia dilihat dari Regional Security Complex yang mempengaruhi kerjasama penanggulangan terorisme Indonesia-Australia pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terfokus pada kerjasama Kepolisian Australian Federal Police (AFP) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga bagaimana pengupayaan kerjasama antara Indonesia dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dalam memaparkan upaya-upaya Indonesia-Australia dalam menanggulangi terorism dikawasannya dimana data-data yang diperoleh secara pustaka. Dari penelitian ini dinamika hubungan Indonesia-Australia sering mengalami pasang surut yang cukup serius, namun demikian kerjasama antara keduanya tetap dilakukan untuk menjaga keamanan kawasan dari ancaman terorisme. Peningkatan terorisme yang terjadi 5 tahun terakhir 2017-2021 membuat Indonesia-Australia meningkatkan kerjasamanya dalam penanggulangan terorisme. Pada kerjasama penanggulangan terorisme antara Indonesia-Australia di era Pemerintahan Joko Widodo periode II, kerjasama banyak dilakukan dengan cara berdialog dan seminar terkait isu-isu terorisme. Dari kerjasama antara Indonesia-Australia dalam penanganan terorisme ini menjadi salah satu aspek amity yang ditunjukkan walau diwarnai dengan konflik diantara keduanya.

Kata Kunci: *Hubungan Bilateral, Regional Security Complex, Indonesia-Australia, Terorisme, AFP-Polri*

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau organisasi yang dapat menimbulkan ancaman bagi kedaulatan dan kedamaian dari suatu negara. Terorisme merupakan sebuah kegiatan dalam instrumen politik maupun agama dimana para peneror berupaya untuk mencari dukungan dengan serangkaian aksi tindak kekerasan publik demonstratif yang didalamnya diikuti dengan aksi ancaman mengancam untuk mengintimidasi, memberikan *pressure*, dan pemaksaan dengan kekerasan kepada target sasaran teror. Keberadaan teroris dan tindak terorisme mulai dilirik sebagai isu internasional setelah kejadian di Washington DC yang dikenal dengan aksi terorisme 9/11 pada tahun 2001 silam, dimana ini membuat Presiden Amerika George Bush untuk memerangi aksi dan tindak terorisme pada 12 September 2001 lalu (Barak, 2021).

Kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam menanggulangi terorisme ini dilakukan demi menjamin keamanan dari dua negara dari ancaman kejahatan lintas negara dan meningkatkan keamanan kedua negara dengan saling membantu menyediakan keamanan tersebut. Hal ini ditunjukkan dari dibentuknya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam wacananya menciptakan kawasan Indonesia dan Australia yang aman dari aksi ancaman terorisme yang difokuskan pada kerjasama antara AFP (*Australian Federal Police*) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Kasus terorisme yang terjadi pada tahun 2002 di Bali, menyebabkan banyak korban yang jumlahnya mencapai ratusan jiwa Warga Negara Indonesia dan diantaranya adalah Warga Negara Asing yang sedang melakukan liburan ke Bali. Korban Warga Negara Asing (WNA) yang paling banyak terkena dampak teror penggeboman di Bali adalah Australia. Tragedi Bom Bali merenggut banyak korban dari warga negara mereka di antara ratusan korban baik yang mengalami luka-luka hingga meninggal dunia. Yang mana tercatat 202 korban meninggal dunia dan 209 korban luka-luka, dimana sebanyak 88 korban diantaranya dapat diidentifikasi sebagai warga negara Australia (Riza, 2003). Pemerintah bertindak cepat untuk menyelidiki dan menyelesaikan konflik, melakukan kerja sama bilateral demi mencegah dan mengatasi isu tindak kejahatan terorisme di kawasan Indonesia dan Australia. Kerjasama ini dimulai pada masa pemerintahan Presiden Megawati dimana tragedi Bom Bali I dan

Bom Bali II terjadi yang melibatkan AFP dan Polri dalam pemberantasan terorisme (Hanifah, 2019). Rentetan tragedi terorisme yang terjadi di Indonesia menjadi landasan bagi Indonesia dan Australia melakukan kerjasama penanggulangan terorisme ini, yang dimulai dengan *MoU on Combating International Terrorism 2002* (Hardiana et al., 2014).

Kejahatan bersifat siber sedang trend terjadi beberapa tahun belakangan ini didukung oleh perkembangan IPTEK. Salah satunya adalah terorisme yang telah bertransformasi dari aksi terorisme tradisional menjadi terorisme bersifat cyber. Di Indonesia sendiri *cyber terrorism* sudah terjadi semenjak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013. Indonesia dan Australia melihat bahwa terorisme dan ekstrimisme menjadi ancaman laten, baik secara ideologi, politik, dan konflik horizontal bagi keamanan negaranya sehingga mereka sepakat untuk meningkatkan kerjasama mereka dalam pertemuan *The 8th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM)* membahas isu-isu terkait pencegahan terorisme, ekstrimisme, peningkatan maritim dan *cyber security* (Polhukam, 2021). Ditambah dengan terjadinya peningkatan aktifitas terorisme sepanjang tahun 2016-2017 selama masa pemerintahan Joko Widodo (Hanifah, 2019). Kemudian pada *The 9 Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM)* di Melbourne, Australia Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Dari pertemuan ini, dibahas mengenai pemberantasan terorisme melalui *Foreign Terrorist Fighter (FTF)*, radikalisasi secara online, radikalisasi perempuan dan generasi muda, serta perkembangan upaya penanggulangan terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan (Polhukam, 2023). Pada pertemuan pertama dan kedua yang dilakukan kedua Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia ini mereka sepakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan kapasitas nasional negara masing-masing dalam kontra-terorisme dan kejahatan lintas batas juga diperluas pada aspek *cyber crime* dan *Foreign Terrorist Fighter (FTF)*. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini difokuskan untuk meningkatkan peran Polri dan AFP untuk penanganan aksi-aksi terorisme yang ada di masing-masing negara dan juga menjangkau Kawasan Asia Pasifik.

Terdapat penelitian yang membahas terkait Kerjasama Indonesia-Australia dalam penanggulangan terorisme. Karya Nabila Nur Aziza mengenai kerjasama Indonesia-Australia bidang keamanan berfokus pada *cyberspace* atau *cyber terrorism* sebagai sebuah ancaman baru dalam kedaulatan kedua negara (Aziza, 2019). Karya Mutia Nur Fajrina Maksam mengenai Implementasi kerjasama Indonesia-Australia melalui

PPATK-AUSTRAC yang menjadi kerjasama *Legislative and Judicial Measure* sebagai bentuk *counter terrorism act* (Maksum, 2020). Karya Pahlevi, Raden Muhammad Rizky mengenai kebijakan-kebijakan Indonesia memerangi aksi terorisme dan keterlibatan AFP-Polri sebagai langkah preventif dan kuratif terhadap terorisme (Pahlevi, 2020). Karya Encik Mohammad Burhansyah (Burhansyah A, 2016) dan karya Shara Yosevina Simanjuntak (Simanjuntak, 2016) mengenai kerjasama Polri-AFP dimana kedua penelitian sama-sama membahas terbentuknya JCLEC (*Jakarta Centre for Law enforcement Cooperation*) dan *capacity building*. Peneliti melihat dinamika kerjasama antara Indonesia-Australia ini berfokus pada dibentuknya badan intelegen dalam menanggulangi cyber terorisme.

I Made Yuda, dkk. membahas mengenai kerjasama kontra-teroris Indonesia-Australia pada tahun 2002-2008 (Hardiana et al., 2014). Siti Mutiah Setyawati dan Dafri Agussalim (Setyawati & Agussalim, 2016) membahas mengenai karakter *security complex amity dan enmity* yang hanya menjelaskan terkait dinamika hubungan Indonesia-Australia juga Genta Mansur yang menggunakan Teori *Regional Security Complex* untuk melihat stabilitas ASEAN dari aspek *Balance of Power* (Mansyur, 2016). Adhi Cahya Fahadayna (Fahadayna, 2020) membahas dukungan Australia untuk Indonesia dalam penanganan kontra-terorisme dengan menginisiasikan beberapa program. Max Fredik Leatemia (Leatemia, 2019) membahas tentang kerjasama terorisme Asia Tenggara dimana Australia sebagai aktor eksternal membantu dalam kerjasama ini memberantas masalah pendanaan terorisme menggunakan teori RSC.

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas, telah membahas upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia-Australia dalam rangka penanggulangan terorisme di kawasan. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia-Australia dalam penanggulangan tindak terorisme merupakan salah satu bentuk amity, yaitu salah satu dari karakteristik teori *Regional Security Complex* yang saling menunjukkan sikap saling peduli dan support antar negara. Meskipun kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia-Australia dalam penanggulangan terorisme telah berlangsung sejak lama. BNPT Indonesia mengungkapkan bahwa GTI Indonesia menunjukkan skor yang fluktuatif terhadap tindak terorisme dalam kurun waktu 2017-2022, angka pelaku tindak terorisme masih terus berfluktuasi dan naik turun. Dari peneliti memaparkan rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang diatas, yaitu: “Bagaimana Kerjasama Indonesia-Australia dalam penanggulangan terorisme di Kawasan Indonesia-Australia pada periode II

Pemerintahan Joko Widodo?”. Penelitian ini akan berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh AFP-Polri sebagai aktor yang terlibat dalam proses penanggulangan terorisme yang terjadi di Kawasan Indonesia-Australia.

B. Konsep

Terorisme

Terorisme dapat dikaitkan dengan kekerasan, pengeboman, penembakan, penembakan, juga ancaman dalam melakukan proses aksinya. Aksi terorisme menjadi bentuk perang psikologis dimana pelaku terorisme menyebarkan teror di ruang lingkup masyarakat yang nantinya menimbulkan kecemasan dan rasa takut. Aksi terorisme mampu mempermainkan ketakutan manusia terhadap kematian, ketidakpastian serta dapat memanipulasi korbannya yang mana ini mempengaruhi psikologis korban terorisme (Ropi, 2016). Dalam Konverensi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), definisi dari terorisme adalah tindakan-tindakan kejahatan yang diarahkan kepada negara secara langsung untuk menciptakan teror untuk orang-orang tertentu, kelompok tertentu maupun masyarakat.

Dimana kemudian definisi terorisme di Indonesia diwujudkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme yang didalamnya menjelaskan bahwa tindak terorisme merupakan sebuah perbuatan melawan hukum secara terstruktur yang dilancarkan untuk mengganggu dan menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara demi membahayakan kemerdekaan sampai nyawa seseorang yang menimbulkan kerusakan umum dan teror yang mengganggu objek vital strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum maupun fasilitas internasional (Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. , 2015).

Kesimpulannya, aksi atau tindak terorisme merupakan berkelompok yang prosesnya menciptakan ketakutan publik yang dalam implementasinya menggunakan kekerasan dan ancaman. Kekerasan, intimidasi, dan ancaman dalam kegiatan terorisme menjadi cara efektif bagi kelompok terorisme untuk membuat targetnya melakukan apa yang menjadi tujuan terorisme tersebut didorong psikologis korban akibat rasa takut yang berlebihan. Namun, bagi dunia internasional beranggapan bahwa hal ini tidak

dibenarkan, kekerasan bukanlah jalan yang efektif dalam mencapai suatu tujuan sehingga terorisme dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan.

Regional Security Complex Theory

Regional Security Complex atau RSCT merupakan teori yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Waever dalam tulisannya "*Regions and Power The Structure of International Security*" yang mana menjelaskan bahwa Regional Security Complex merupakan pendekatan yang memperhatikan dan memahami isu-isu dalam dinamika keamanan internasional (Buzan & Wafer, 2003). RSCT bernaung pada mazhab Copenhagen School of Security Studies, sebuah kajian studi yang berkaitan dengan keamanan yang difokuskan pada aspek-aspek sosial (Mansyur, 2016). Regional Security Complex sebuah teori baru yang muncul sebagai dimensi yang menghubungkan pola kehidupan antar negara di kehidupan internasional pada masa sebelum perang dingin hingga pasca perang dingin (Andes Nurdiana, 2018).

Regional Security Complex atau RSCT menganalisa unsur-unsur geografi, etnisitas, dan budaya yang mana ini berpengaruh kepada perkembangan ekonomi dan sistem politik yang nantinya menimbulkan ketergantungan antar negara. Hal ini akhirnya berdampak pada level sistem pertahanan sekuritas negara. Adanya saling ketergantungan dan kerjasama keamanan antara negara dalam suatu kawasan ini menurut Barry Buzan adalah unsur penting dari pembentukan RSC. Meskipun sifatnya saling ketergantungan dan saling berkerjasama, Buzan tidak memungkiri adanya persaingan, perimbangan kekuasaan, aliansi, serta masuknya kekuatan eksternal (Buzan & Wafer, 2003)

Dalam melakukan kajian menggunakan teori ini, terdapat 4 level analisis. Yang pertama adalah *domestic level*, dimana situasi internal yang dialami suatu negara atau kawasan perlu dikaji dari tingkat domestik untuk dapat melihat dampak pada sisi stabilitas keamanannya. Yang kedua adalah *state to state relations*, yang difokuskan pada relasi antar negara kawasan terkait bidang keamanan. Yang ketiga adalah *region's interaction with neighbouring regions*, pada saat mengkaji adakah bentuk relasi yang dilakukan dengan negara tetangga yang mempengaruhi masalah keamanan di kawasan. Yang keempat adalah *the role of global power in the regions*, hubungan antara struktur keamanan global dan regional yang saling mempengaruhi perlu diperhatikan. Selain keempat level analisis ini ada empat variabel yang menjadi struktur utama dalam

membentuk sebuah kawasan keamanan. Pertama, *boundary* atau batas wilayah secara geografis. Kedua, *anarchic structure* atau struktur anarki yang dibatasi oleh minimal terdiri dari dua unit otonom. Ketiga, *polarity* atau polaritas yang berkaitan dengan distribusi kekuatan global dan regional baik unipolar, bipolar, atau multipolar serta interaksi dan distribusi kekuatan baik antara sesama kekuatan domestik maupun dengan kekuatan global. Keempat, *social structure* atau struktur sosial yang diukur dari pola pertemanan dan permusuhan antar negara kawasan yang dapat diukur dengan faktor sejarah, budaya, agama, kondisi geografis, atau faktor-faktor sosial.

Karakteristik dari *security complex* yang disampaikan oleh Buzan disebut "*pattern of amity and enmity among state*" (Setyawati & Agussalim, 2016). Jika dijabarkan amity yang dimaksud oleh Buzan berkonotasi pada hubungan antar negara yang terjalin dari persahabatan, support, maupun saling melindungi satu sama lain. Sedangkan enmity didefinisikan sebagai hubungan antar negara yang didasari dari kecurigaan dan rasa takut yang muncul antar negara yang terlibat. Adanya amity maupun enmity didasari dari isu-isu yang melibatkan negara-negara yang bersangkutan yang akan memberikan dampak terhadap dinamika fluktuasi hubungan negara-negara tersebut. Variabel *boundary* atau wilayah yang mengacu pada batas-batas luar kawasan yang memisahkan unit yang RSC dengan unit yang berada di luar kawasan masuk kedalam dan variabel anarki menjadi latar belakang dari kerjasama keamanan antara negara Indonesia dan Australia yaitu keberadaan terorisme seperti –ISIS yang melakukan aksi teror di kawasan Asia Pasifik meliputi Indonesia-Australia menjadi latar belakang kerjasama kedua negara ini. kemudian pada variabel polaritas dan struktur sosial menjadi faktor dinamis dan akan sangat berpengaruh terhadap karakter keamanan kawasan (Setyawati & Agussalim, 2016).

Setiap negara dalam sistem global mengalami interdependensi keamanan dengan negara lain. Namun karena keadaan dan ancaman politik juga keamanan cenderung lebih mudah menyebar dalam jarak dekat maupun jauh membuat ketidakamanan sering kali berkaitan dengan aspek kedekatan wilayah. Dimana hal ini menyebabkan interdependensi akan lebih nampak antara negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Namun tidak lepas dari ini semua negara yang berdekatan dapat melakukan pengaturan dan kerjasama dibidang keamanan bersama untuk stabilitas kawasan mereka. Bagaimana hubungan dan interaksi antar unit menjadi penting dalam menentukan apakah mereka memiliki tujuan yang sama. Selain itu hubungan antar negara dapat terjalin selain dari kedekatan teritori dapat dipengaruhi juga dari

kesamaan sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya antar negara-negara juga dapat menumbuhkan rasa solidaritas yang kuat antar aktor dalam suatu kawasan (Leatemia, 2019).

Sebagai sebuah RSC, keamanan antara negara Indonesia dan Australia dipengaruhi oleh dinamika konflik dan hubungan antara kedua negara ini (*amity dan enmity*). Hubungan amity atau hubungan saling support dimulai bahkan sebelum Indonesia merdeka yang ditunjukkan dengan dukungan Australia dalam menghadapi Belanda dengan tidak membiarkan kapal-kapal Belanda berlabuh di Australia sekaligus menjadi mediator untuk konflik Indonesia-Belanda setelah bergabungnya Australia dalam Komisi Tiga Negara atau UNCI (*United Nations Special Commission on Indonesia*) dimana Australia berperan membangun pandangan internasional untuk mendukung perjuangan Indonesia dalam memerangi penjajah.

Terdapat keistimewaan dari hubungan Indonesia-Australia. Jika biasanya dua negara yang berdekatan memiliki kemiripan secara etnis, budaya, dan agama yang berdampak pada kepentingan nasional, politik luar negeri, dan masalah keamanan. Antara Indonesia dan Australia sangatlah berbeda dari ketiga aspek ini. Dimana mayoritas penduduk Australia adalah ras Kaukasia, ini membuat penduduk Australia memiliki budaya seperti orang-orang Eropa pada umumnya. Sedangkan di Indonesia mayoritas berasal dari ras mongoloid, sehingga budayanya lebih banyak mirip dengan negara-negara serumpunnya di Asia Tenggara. Dalam aspek agama Australia di dominasi beragama Kristen sedangkan Indonesia di dominasi dengan agama islam.

Indonesia dipimpin Soekarno, dengan kebijakan luar negerinya yaitu gerakan anti-Barat dan Gerakan Non Blok ini secara tidak langsung Indonesia merenggangkan diri dari Australia. Kisaran tahun 1961-1964 hubungan Indonesia-Australia mengalami penurunan lagi Namun hubungan keduanya malah merenggang Tahun 1963 Indonesia mencoba mencegah Federasi Malaysia terbentuk. Sehingga pada tahun itu Indonesia mengkonfrontasi Malaysia dan terjadi peperangan antara Indonesia-Malaysia diperbatasan Kalimantan. Dalam konflik ini Australia kedatangan terlibat dan membela Malaysia dengan mengirimkan pasukan militer dan bergabung pada pertempuran pada tahun 1964. Bergabungnya Australia dalam konflik ini disinyalir atas hubungan Australia dengan Inggris, dimana Inggris meminta Australia membantu Malaysia. Keterlibatan Australia dalam konflik Indonesia terjadi lagi saat Timor Timur ingin melepaskan diri dari Indonesia (Nailufar, 2020). Berdasarkan BBC News Indonesia 2017, hubungan antara Indonesia-Australia disebut tegang namun pragmatis. Ketegangan

hubungan keduanya kembali muncul akibat permasalahan Timor Timur dan Irian Barat. Di era Soeharto, saat Australia menentang Indonesia dalam mengintegrasikan Timor Timur sebagai salah satu wilayah milik NKRI pada 1979, tapi pada 1989 didalam perjanjian Celah Timor Australia secara *de jure* mengakui wilayah Indonesia meliputi Timor Timur. Berkaitan dengan klaim Australia bahwa Papua Barat adalah bagian dari Melanesia dan Papua harus merdeka dari Indonesia ini membuat Indonesia makin tersinggung. Selain itu artikel-artikel tentang korupsi yang dilakukan oleh keluarga Soeharto yang ditulis oleh David Jenkins, membuat Indonesia merasa terhina. Ini membuat hubungan diplomatik Indonesia-Australia terhenti selama artikel itu belum dicabut. Namun setelahnya hubungan kedua negara kembali membaik (Admin, 2017).

Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Australia melakukan penyadapan terhadap Presiden SBY. Aksi penyadapan dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan pegawai NSA pada tahun 2013. Edward mengungkapkan baik menteri dan presiden Indonesia telah disadap via telepon genggam selama 15 hari pada Agustus 2009 (Muliana, 2018). Australia melakukan *spyonisme* terhadap Indonesia merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan Australia-Amerika Serikat dengan agenda *Top Secret Program*, ini Edward bocorkan melalui dokumen intelejen "*National Secret Intelligence*" milik NSA di *Germany's Der Spiegel* dan *Sydney Morning Herald* (Muliana, 2018). Penyadapan ini merugikan Indonesia, karena Indonesia merasa dicurangi oleh Australia.

Meski dalam dinamika hubungan Indonesia dan Australia kerap mengalami pasang surut, dinamika konflik antar negara ini tidak sampai membuat hubungan yang telah terjalin antara Indonesia-Australia sejak awal kemerdekaan putus. Disamping konflik yang membuat kedua negara sering bersitegang terdapat kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini ditengah banyaknya perbedaan secara entis, sosial-budaya, agama dan politik. Aksi terorisme yang melanda Indonesia dan memakan beberapa korban Warga Negara Australia membuat Indonesia-Australia melakukan kerjasama dibidang keamanan *Counter of Terrorism* yang dimulai sejak tragedi Bom Bali I dan Bom Bali II yang terjadi pada tahun 2002 dan terbentuknya Lombok Treaty pada pemerintahan Megawati. Australia sendiri memberikan beberapa inisiasi yang harus dilakukan Indonesia dalam menangani aksi terorisme yang terjadi pada 2002 silam, dan kerjasama ini terus dilakukan demi penguatan keamanan kawasan Indonesia-Australia untuk menangkal terorisme.

C. Metode Penelitian

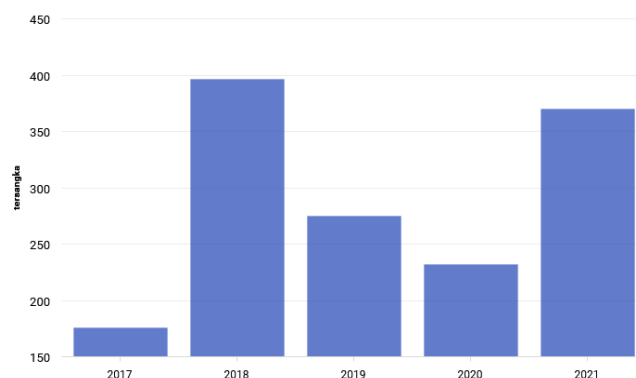
Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Dimana pada jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisa suatu permasalahan atau fenomena sosial yang dilakukan dengan memberikan pemaparan dan analisa fenomena dengan kerangka teoritis yang jelas. Penelitian yang menggunakan jenis deskriptif memiliki tujuan dalam memaparkan berbagai hal dari permasalahan-permasalahan tertentu dengan detail dan jelas yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari objek penelitian. Penulis akan menjelaskan dinamika dari hubungan kerjasama Indonesia-Australia dalam penanggulangan terorisme dan bentuk upaya-upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Indonesia-Australia pada periode II pemerintahan Joko Widodo yang melibatkan AFP dan Polri. Penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif yang dilakukan yaitu analisis yang menekankan pada pengamatan terhadap fenomena yang hadir lalu menarik kesimpulan dari fenomena tersebut. Metode ini memiliki tujuan untuk melihat fenomena sosial yang dilihat dari perspektif partisipan.

Data pendukung penelitian diperoleh dari studi pustaka untuk mendapatkan data-data yang akurat dari sisi keilmuan terhadap dokumen-dokumen baik dalam bentuk skripsi, jurnal, buku, berita, juga laporan yang memuat data mengenai terorisme di Indonesia-Australia di Kawasan Asia-Pasifik yang kemudian diperlukan untuk menganalisa, mendapatkan data, dan menelaah sesuai dengan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian.

D. Pembahasan

Perkembangan Terorisme Era Joko Widodo

Pada perkembangannya, terorisme pada era Presiden Joko Widodo periode I telah memasuki perubahan dari terorisme bentuk tradisional ke terorisme berbasis *cyber*. Dimana terorisme *cyber* digolongkan sebagai salah satu dari *cyber crime*. Kemajuan di bidang IPTEK yang terjadi secara global dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku tindak terorisme sebagai sarana dalam melakukan aksi terorisme.



Sumber:
Databoks. Jumlah Tersangka di Indonesia (2017-2021)

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa di Indonesia sendiri tindak terorisme mengalami naik turun sejak kurun waktu 2017 hingga tahun 2021. Dimana menurut Irjen Pol. Ibnu Suhaenda dalam sebuah konferensi pers selama 5 tahun terakhir ancaman aksi terorisme meningkat sesuai dengan Indeks Terorisme Global (GTI). Dimana pada kurun waktu 2018 terorisme meningkat hampir mencapai nilai 396 tersangka dan menurun pada tahun 2019-2020. Kemudian terorisme naik kembali pada tahun 2021 menjadi 370 tersangka. Kerjasama yang dilakukan Indonesia-Australia dalam penanggulangan terorisme juga mengajak negara-Negara ASEAN untuk berkolaborasi dalam mengamankan Kawasan Indonesia-Australia dari ancaman kejahatan transnasional yang dapat mengganggu berjalannya keamanan dan kedaulatan negara-negara tersebut sejak tahun 2018 dengan penandatanganan MoU dalam KTT Istimewa ASEAN-Australia di *International Convention Centre Sydney*, Australia (Mardiastuti, 2018). Melihat masih maraknya ancaman terorisme yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo sebagai presiden, kerjasama penanggulangan terorisme antara Indonesia-Australia diperkuat hingga masa pemerintahan di periode ke II beliau.

Pada periode II Pemerintahan Joko Widodo terjadi beberapa tindak terorisme di Indonesia yaitu terjadi insiden terorisme yang datanya diperoleh dari Country Reports on Terrorism mulai dari 2019-2021.

Tahun	Insiden Teror	
2019	13 November	Bom bunuh diri di Kompleks Mapolres Medan

2020	April	Pembunuhan 2 warga di Poso, Sulawesi Tengah oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)
	Juni	Penyerangan di Polsek Daha, Kalimantan
	27 November	MIT membunuh warga di Sigi
2021	28 Maret	Jamaah Ansharut Daulah melakukan bom bunuh diri di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus, Sulawesi Selatan
	31 Maret	Tersangka ISIS dibunuh oleh Polri setelah menembakkan airsoft gun ke Markas Polri Jakarta
	Mei	MIT membunuh 4 warga di Poso Sulawesi Tengah

Sumber :

Country Reports on Terrorism 2019 (State, 2020); Country Reports on Terrorism 2020 (State, 2021); Country Reports on Terrorism 2021 (State, 2023).

Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Aksi Preventif terhadap Terorisme

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati yang dimulai pada tahun 2001 dan sebelum kejadian pengeboman di Bali. Indonesia dan Australia melakukan sebuah kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia didasari oleh *MoU/Nota Kesepahaman* kedua negara dalam memberantas terorisme internasional yang mana kesepakatan ini ditandatangani pada 7 Februari 2002 oleh kedua negara. Indonesia diwakilkan oleh Abdurrachman Mattalitti, Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Departemen Luar Negeri sedangkan Australia diwakilkan oleh Richard Smith, Duta Besar Australia untuk Indonesia. Kerjasama ini merupakan bentuk kesadaran dari kedua pemerintah Indonesia dan Australia yang melihat ancaman terorisme adalah kejahatan transnasional lintas negara yang merupakan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kedua negara tersebut. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Australian ini difokuskan pada kerjasama kepolisian yang dibuat pada 12 Juni 2002 dan setiap tiga tahun akan diperbaharui jika kerjasama antara kedua ingin tetap dilanjutkan. Kerjasama ini adalah upaya penanggulangan terhadap terorisme di Indonesia secara kuratif –dengan pembentukan Tim Gabungan Intelejen dan preventif –pencegahan terjadinya aksi

dibantu *Jakarta Center of Law Enforcement Cooperation* juga melakukan pertukaran informasi dan *intelegent*, pembentukan kantor penempatan penghubung serta pengembangan kapabilitas institusi, infrastruktur organisasi, sumber daya manusia dan peralatan yang telah disepakati dalam *MoU* yang telah ditandatangani pada 7 Februari 2002 tadi (Ansari, 2016).

Teror bom yang terjadi di Bali pada 12 Oktober 2002, memakan banyak korban jiwa termasuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Tragedi pengeboman Bali ini diasosiasikan oleh Ali Imron, Amrozi, Ali Samudra yang tergabung dalam jaringan Darul Islam. Total korban dari tragedi ini mencapai angka 202 jiwa dan sebanyak 88 jiwa yang meninggal adalah Warga Negara Asing dari Australia dan 2 dari korban tidak dapat diidentifikasi kewarganegaraannya (Setyaningrum, 2022). Indonesia dan Australia menjadi negara paling terdampak dari kasus ini. Sehingga Indonesia dan Australia akhirnya membuat kerjasama untuk mencegah terjadinya terorisme dan tragedi pengeboman Bali tidak terjadi lagi sebagai upaya melindungi warga negaranya.

Setelah terjadinya tragedi pengeboman di Bali pada 12 Oktober 2002 tersebut posisi Indonesia dan Australia segera menuju ke lokasi kejadian untuk memberikan bantuan pada korban pengeboman. Kemudian pada 18 Oktober 2002 dibuatlah perjanjian pembentukan oleh AFP yang berisikan peraturan kerjasama antara polisi Indonesia dan Australia untuk melakukan operasi gabungan. Penyelidikan kasus pengeboman ini dipimpin oleh AFP dimana AFP mengerahkan sebanyak 500 anggota kepolisiannya. Selain itu dalam penanganan tragedi ini FBI (*Federal Bureau of Investigation*) menjadi mitra dan berkontribusi selama penyelidikan ini. Kerjasama yang dilakukan oleh AFP dan Polri terbukti efektif dapat menangani kasus ini, yang dibuktikan dengan ditangkapnya 36 teroris yang diantaranya ada 3 pelaku utama pengeboman di Bali. Ketiga tersangka utama tersebut adalah Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ketiganya terbukti melanggar Undang-Undang No. 15 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan nantinya akan diasingkan di Nusa Kambangan untuk pelaksanaan eksekusi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Operasi gabungan juga mengidentifikasi semua korban pengeboman di Bali dan memulangkan korban jiwa kembali pada keluarganya.

Dengan kesuksesan kerjasama antara kepolisian Indonesia dan Kepolisian Australia pada 2002 ini dibentuklah operasi gabungan permanen antara kedua kepolisian tersebut. Operasi gabungan ini disebut dengan Jakarta Operations Centre dan

pada 2007 berubah menjadi *Jakarta Regional Cooperations Centre*. Dari sini AFP menawarkan bantuan kepada kepolisian Indonesia untuk operasi penanggulangan isu-isu kontra-terorisme. Di Indonesia juga dibuka Transnasional Crime Centre, Jakarta secara resmi untuk memperkuat penegakan hukum melawan kejahatan di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kerja sama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia adalah perjanjian antara kepolisian Australia AFP dan kepolisian Indonesia Polri dengan menandatangani Nota Kesepahaman, workshop, pelaksanaan forum, dan kerja sama dalam rangka pembiayaan terorisme. Pengaturan mengenai kerja sama antara kedua kepolisian Australia dan Indonesia untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara yang ditandatangani pada 3 Agustus 2015, Jakarta. Pengaturan ini dibuat sesuai dengan apa yang telah disepakati pada Kerangka Kerja Sama Keamanan di Lombok pada 2006 dan ditegaskannya kembali perjanjian yang dilakukan oleh AFP (*Australian Federal Police*) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Pada 21 Desember 2015 kemudian ditandatangani sebuah *Memorandum of Understanding* Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pemberantasan Terorisme Internasional. Isi *MoU* ini adalah tentang kesadaran kedua pemerintah Indonesia dan Australia bahwa aktivitas lintas negara Indonesia-Australia dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan dari rakyat Indonesia dan Australia (Pemerintah Indonesia, 2018). Sehingga dengan kesadaran yang mereka miliki ini perlu dilakukan untuk memperkuat ikatan kerjasama internasional yang direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan JCLEC sebagai wadah kerja sama menegakkan hukum di Indonesia dan Australia (Simanjuntak, 2016).

Indonesia dan Australia melihat bahwa terorisme dan ekstrimisme menjadi ancaman serius bagi keamanan negaranya sehingga mereka sepakat untuk meningkatkan kerja sama mereka dalam kesepakatan yang dibuat antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia dalam pertemuan di Sydney, Australia juga di Jakarta, Indonesia. Pada pertemuan pertama dan kedua yang dilakukan kedua Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia ini mereka sepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas nasional negara masing-masing dalam kontra-terorisme dan kejahatan lintas batas juga diperluas pada aspek *cyber crime*, *foreign terrorist fighter*. Terkait dengan *Foreign Terrorist Fighter* (FTF), Indonesia melakukan berbagai workshop dan konferensi internasional melibatkan negara-negara lain untuk saling

bertukar informasi dan saling menguatkan kerjasama internasional dalam menangani kasus-kasus FTF (Kemenlu, 2019). Keamanan Indonesia pada pemerintahan Joko Widodo diarahkan pada penekanan kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Dalam penanganan kasus terorisme, Indonesia memadukan soft approach dan hard approach (Pamulatsih & Perwita, 2020).

Pada masa Pemerintahan Joko Widodo periode I (2014-2019), di Australia sekitar kurun waktu 2014-2017 terjadi kurang lebih 4 aksi (Hanifah, 2019). Kemudian pada 2018 terdapat 2 aksi yang terjadi pada 9 Februari 2018 dilakukan oleh Momena Shoma membunuh orang berusia 56 tahun di Mill Park, Victoria (SBS News, 2018) dan 9 November 2018 yang dilakukan oleh Hassan Khalif Shire Ali yang melakukan pembunuhan dan membakar mobil 3 korban (Berlinger, 2018). Yang kemudian selama 2019 Australia tidak mengalami aksi-aksi yang terkait terorisme (State, 2020). Di Indonesia kasus-kasus terorisme kebanyakan adalah aksi pengeboman. 2016 terjadi sekitar 5 aksi pengeboman yang terjadi di Plaza Sarinah 14 Januari 2016 (Okezone, 2023), bom bunuh diri di halaman markas Kepolisian Surakarta dan di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep (Sofwan, 2016), bom molotov di Gereja Oikumene di Samarinda dan di Vihara Budi Dharma (BBC, 2016). Pada 2017 terjadi Bom Bandung di taman Pandawa Cicendo (Kompas, 2017) dan Bom Panci di Kampung Melayu Jakarta Timur (JawaPos, 2017). 2018 terjadi kerusuhan di Mako Brimob dengan narapidana terorisme, Bom Surabaya 13-24 Mei 2018 (BBC, 2018), Serangan Mapolda Riau oleh kelompok terorisme Jamaah Ansharut Daulah (Sohuturon, 2018), dan pengeboman sebanyak 3 kali di Desa Pogar Pasuruan (CNN, 2018). Di penghujung pemerintahan Jokowi periode I terjadi Bom Sibolga 12-13 Maret 2019 (Monza & Hartono, 2019) dan penyerangan dengan kunai di Pandeglang kepada Menkopolkam Wiranto (CNN, 2019).

Kerja sama antara Indonesia dan Australia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diantaranya adalah melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti kesepakatan antara Indonesia (BNTP) dan Australia dalam *Partnership of Justice 2* yang bertujuan untuk memperkuat lembaga dan aparat penegak hukum Indonesia dan stabilitas kemakmuran Indonesia. Pertemuan Dua Plus Dua (*2+2 Meeting*) antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari Indonesia dan Australia untuk membahas isu-isu dan strategi pertahanan demi mengembangkan kerja sama strategis Indonesia dan Australia. Melakukan pertemuan untuk menegaskan komitmen antara Indonesia dan Australia dalam *Meeting of the Indonesia-Australia Ministerial Council on*

Law and Security yang dilakukan meningkatkan kerjasama dibidang hukum dan keamanan. Lalu dilakukan Pertemuan Pejabat Senior untuk meningkatkan kerja sama antara Polri dan AFP dalam meningkatkan kapasitas kepolisian Indonesia dengan membahas langkah-langkah penanganan kejahatan transnasional dan internasional seperti terorisme, *cyber crime*, dan penyelundupan manusia. Melakukan program pelatihan yang disediakan oleh AFP, programnya disebut dengan Management of Serious Crime (MOSC). Indonesia dan Australia juga melakukan pertukaran intelejen sebagai bentuk kerja sama, pertukaran ini termasuk melakukan tukar informasi mengenai sindikat terorisme. Yang terakhir adalah kerjasama INTRACT (*Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Centre*) dan AUSTRAC (*Australian Financial Transaction Report and Analysis Centre*) yang pada tahun 2015 melakukan pendanaan ISIS guna meningkatkan pemahaman mengenai aliran dana dari pelaku teroris asing.

Akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, terorisme memanfaatkan teknologi-teknologi dalam melakukan aksinya. Indonesia-Australia menggelar *The first Australia-Indonesia Cyber Policy Dialogue* was antara Menteri Luar Negeri Bishop dan Marsudi yang diselenggarakan di Canberra pada 4 Mei 2017, dimana kedua negara menegaskan komitmen mereka terkait internet terbuka, bebas, dan aman untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi juga menegaskan kembali untuk memperdalam kerjasama terhadap ancaman *cyber threats*. Dialog dipimpin Ambassador for Cyber Affairs Australia Dr. Tobias Feakin dan Desra Percaya Director General for Asia Pacific and Africa Affairs, kemudian pada 3 Agustus 2018 di Jakarta digelar kembali *The second Australia-Indonesia Cyber Policy Dialogue* (Pemerintah Australia, 2017).

Demi menanggulangi hal ini, Kepolisian Republik Indonesia dan AFP melakukan investigasi kejahatan dunia maya dengan membangun satelit investigasi. Kantor satelit ini berada di Polda Metro, Mabes Polri di beberapa wilayah Indonesia. Dengan dibangunnya satelit investigasi *cyber crime*, kepolisian dapat memantau berbagai kejahatan di ruang cyber contohnya adalah pendanaan terorisme melalui internet, komunikasi sindikat terorisme melalui internet atau email, serta kejahatan lainnya. Manfaat dari dibangunnya satelit ini dapat mengatasi ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia. Selain itu dengan adanya satelit investigasi ini kepolisian dalam melacak dan mengejar sindikat terorisme, kepolisian dapat menangkap sindikat terorisme sebelum aksi teror dilakukan, memantau kegiatan-kegiatan terorisme yang dilakukan teroris melalui internet.

Untuk meningkatkan kapabilitas personil dan perkembangan teknologi saat ini, Polri melakukan pelatihan meningkatkan kemampuan anggotanya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, melakukan pelatihan dengan pejabat senior dalam program MOSC yang membahas pendekatan strategis dalam menangani kejahatan transnasional dimana program ini bukan hanya antara Indonesia dan Australia melainkan Malaysia, Thailand, dan Filipina. AFP dan Polri juga membuat Forum Pimpinan Kepolisian Australia dan Indonesia (AIPLF) sebagai upaya mempererat hubungan antara AFP dan Polri. Forum ini digunakan untuk mendiskusikan keputusan yang akan diambil dan mendiskusikan strategi kepolisian dimasa depan. Kegiatan peningkatan kapasitas ini dipimpin dan dipandu oleh Polri dan AFP. Dari kegiatan ini Polri dan AFP diuntungkan dengan dapat saling membantu dan meingkatkan pengetahuan dalam menangani ancaman terorisme yang akan terjadi kapan saja. Peningkatan ini diantaranya adalah meningkatkan keterampilan, strategi, dan teknik anggota kepolisian Polri dan AFP. Selain itu dari sini polri dan AFP diberikan pengetahuan akibat dampak yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan terorisme.

Pada periode II pemerintahan Joko Widodo, *The third Australia-Indonesia Cyber Policy Dialogue* digelar 2 September 2020 dari dialog ini Indonesia dan Australia meningkatkan keterlibatannya dalam isu cyber yang konsisten dalam *Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (2020-2024)* yang mana terdapat 5 pilar yang dibicarakan dalam dialog ini yaitu meningkatkan kemitraan ekonomi dan pembangunan, Menghubungkan orang, Mengamankan kepentingan bersama dan kawasan, Kerjasama maritim, dan Kontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indo-Pasifik. Pada pilar Mengamankan kepentingan bersama dan kawasan Indonesia-Australia ingin mendorong pengorganisasian mekanisme dialog strategis meliputi Rapat Pimpinan Tahunan (ALM), Pertemuan 2+2 Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia-Australia (2+2 Meeting), Dewan Menteri Hukum dan Keamanan Indonesia-Australia (IAMCLS), Konsultasi Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia (Pemerintah Australia, n.d.). Kerjasama kontra terorisme antara Indonesia-Australia berada pada pilar ketiga sesuai dengan yang ada dalam *Lombok Treaty*. Didalam dialog ketiga ini, dibuat rencana aksi mengenai peningkatan fokus kerjasama pencegahan propaganda radikalisme dan ekstrimisme dengan pendekatan antarbudaya maupun agama demi kerukunan ditengah masyarakat, selain itu dalam dialog ini perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan terorisme dan *human trafficking* akan diperhatikan (BNPT, 2020). Duta Besar Australia, Gary Quinlan memberikan

apresiasi pendekatan *softpower* BNPT sebagai upaya pencegahan terorisme dengan merangkul organisasi masyarakat (BNPT, 2020). Dimana pencegahan terorisme dengan merangkul organisasi masyarakat dinilai berhasil menurunkan indeks resiko terorisme dan potensi radikalisme Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 indeks potensi mencapai angka 12,2% dan pada tahun 2022 menjadi 10% setelah dilakukan survei oleh BNPT (Birokrasi, 2022).

Pembahasan antara Indonesia dan Australia tentang perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan terorisme pada *Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (2020-2024)* dibahas kembali di Bali, 21 Desember 2022 oleh Rina Soemarna –Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam dan Richard Freakes –Deputi *CFC Center* Kemdagri Australia (Polhukam, 2022). Program ini dimitrai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) dimana KemenPPA bertugas menyusun kebijakan melibatkan Densus 88 (Polri) membentuk Forum Koordinasi dukungan psikologis yang bersinergi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022). Selain itu Indonesia-Australia melakukan *high-level visits* berkaitan dengan kerjasama penanggulangan terorisme oleh Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Cyber Australia Clare O'Neil mengunjungi Jakarta pada Desember 2022.

JCLEC yang didirikan oleh Indonesia-Australia sebagai kerjasama kontraterorisme, juga menjadi penting untuk pelatihan penegakan hukum dimana JCLEC pada tahun 2023 telah mencapai 40,000 partisipan tepat pada 24 Februari 2023 kemarin. Pada periode II pemerintahan Jokowi dan akibat dampak Covid-19, JCLEC melakukan inovasi yaitu menggabungkan platform Kegiatan Daring (OMD) untuk tetap menjalankan fungsinya mengadakan program dan kegiatan penegakan hukum (Cooperation, n.d.). Seperti yang disampaikan diatas sebagai upaya penanggulangan terhadap ancaman terorisme dilakukan pertukaran intelejen antara Indonesia dan Australia. Ini adalah salah satu upaya untuk memotong jalur sindikat terorisme dengan melakukan pertukaran informasi antar intel. Informasi ini nantinya diproses, dianalisis, dan digabungkan didata yang dimiliki untuk mendeteksi sindikat terorisme secepat mungkin. Intelejen baik dari Indonesia dan Australia akan melakukan pemantauan dan observasi untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan pembubaran organisasi dan aksi terorisme kemudian melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap pelaku aksi terorisme.

E. Simpulan

Kerja sama antara Indonesia dan Australia terjalin akibat tragedi pengeboman di Bali yang menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa dimana Indonesia dan Australia menjadi penyumbang korban terbanyak saat pengeboman dari kelompok terorisme di Bali 12 Oktober 2002 terjadi. Baik Indonesia dan Australia keduanya berusaha saling menjaga hubungan baik ini dengan melakukan berbagai kerjasama salah satunya adalah kerjasama keamanan. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia-Australia dalam kontra-terorisme ini menjadi salah satu aspek *amity* atau kegiatan saling support dan melindungi dari kedua negara. Aspek *amity* terlihat dari bertahannya kerjasama di bidang keamanan dalam hal ini adalah penganggulangan terorisme antara kedua negara karna melihat terorisme sebagai sebuah ancaman yang serius untuk kawasannya sehingga kerjasama ini terus diperkuat.

Pada masa pemerintahan Joko Wododo kerja sama antara Indonesia dan Australia dilakukan dalam penanggulangan kejahatan lintas negara yang ditandatangani pada 3 Agustus 2015. Pada tanggal 21 Desember 2015, ditandatangani sebuah *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pemberantasan Terorisme Internasional. Isi dari MoU ini adalah tentang kesadaran kedua pemerintah Indonesia dan Australia bahwa aktivitas lintas negara indonesia-Australia dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan dari rakyat Indonesia dan Australia (Pemerintah Australia, n.d.). Sejak periode I pemerintahan Presiden Joko Widodo arah kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam usaha untuk menanggulangi aksi dan sindikat terorisme dikawasan kedua negara ini jika dilihat lebih mengarah pada penanganan terorisme dalam teknologi komunikasi dan informasi sebagai dampak dari kemajuan IPTEK. Dalam kurun waktu 2017-2021 terjadi fluktuasi dalam tindakan terorisme, sehingga pada pertemuan ke- 8 Konsultasi Bilateral Kerja Sama Penanggulangan Terorisme Indonesia-Australia di Sydney, Australia 13 April 2022 memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan.

Pada periode II pemerintahannya, digelar *The third Australia-Indonesia Cyber Policy Dialogue* digelar 2 September 2020 dari dialog ini Indonesia dan Australia meningkatkan keterlibatannya dalam isu cyber yang konsisten dalam *Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (2020-2024)*. Didalam dialog ketiga ini, dibuat rencana aksi mengenai peningkatan fokus kerjasama pencegahan propaganda radikalisme dan ekstrimisme dengan pendekatan antarbudaya maupun

agama demi kerukunan ditengah masyarakat, selain itu dalam dialog ini perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan terorisme dan *human trafficking*. *Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (2020-2024)* dalam implementasinya berkolaborasi dengan KemenPPPA, Kemenag, dan Kemendik. Selain itu JCLEC, tempat pelatihan penegakan hukum kontra terorisme Indonesia-Australia selama Covid-19 melakukan inovasi menggabungkan platform kegiatan daring untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai salah satu bentuk peningkatan Peningkatan ini diantaranya adalah meningkatkan keterampilan, strategi, dan teknik anggota kepolisian Polri dan AFP.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Skripsi

- Admin. (2017). *Pasang Surut Hubungan Australia dan Indonesia: Tegang Namun Pragmatis*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38527300>
- Andes Nurdiana, N. (2018). Peran Politik Dan Keamanan Rusia Di Kawasan Asia Tengah. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(4), 1503–1516. www.international.sindonews.com/read/1053624/40/rusia-ancang-ancang-
- Ansari, R. (2016). Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Australia dalam Penanganan Terorisme di Indonesia Tahun 2002 – 2013. *Journal of International Relations*, 2(1), 88–96.
- Aziza, N. N. (2019). *Analisa Kerjasama Cyber Security antara Indonesia-Australia dalam Menghadapi Ancaman Cyber Terrorism* [Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/54737/>
- Barak, H. (2021). 12 September 2001: AS Umumkan Terorisme Pasca-9/11. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/global/read/4650319/12-september-2001-as-umumkan-perang-atas-terorisme-pasca-911>
- BBC. (2016, November 14). Bom Molotov di Vihara Singkawang “Ingin Perkeruh Suasana.” *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37975418>
- BBC. (2018, May 16). Nathan, Evan, dan Sejumlah Anak dalam Teror BOM Surabaya. *BBC News Indonesia*.
- Berlinger, J. (2018). Melbourne attack: Suspect was inspired by ISIS but had no direct contact, police say. *CNN World*. <https://edition.cnn.com/2018/11/09/australia/melbourne-incident-intl/index.html>
- Birokrasi, K. P. A. N. dan R. (2022). *BNPT: Indeks Resiko Terorisme dan Potensi Radikalisme di 2022 Turun*. Birokrasi, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi.
- BNPT. (2020). *Pertemuan Daring Kepala BNPT dengan Duta Besar Australia, Bahas Prioritas Kerja Sama RI-Indonesia dalam Penanggulangan Terorisme*.
- Burhansyah A, E. M. (2016). *Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia*

- (POLRI)-Australian Federal Police (AFP) Sektor Capacity Building dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia. *Journal of International Relations*, 2(1), 38–46.
- Buzan, B., & Weafer, O. (2003). *Regions and Power: The Structure of International Security*.
- CNN. (2018, July 5). Terduga Pelaku Bom PASuruan yang Buron Pakai KTP Palsu. *CNN Indonesia*.
- CNN. (2019, October 10). Penusuk Wiranto Gunakan Senjata Ninja Ala Naruto. *CNN Indonesia*.
- Cooperation, J. C. for L. E. (n.d.). *Yayasan JCLEC*. Jelec.
- Fahadayna, A. C. (2020). Australia-Indonesia Counter-Terrorisme Cooperation. *Jurnal Transformasi Global*, 5(2), 68–79.
- Hanifah, H. (2019). Kerjasama Intelijen Indonesia Dengan Australia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme di Indonesia Periode 2015-2017. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Hardiana, I. M. Y., Sushanti, S., & Fasisaka, I. (2014). Kerjasama Kontra-Terrorisme Antara Australia Dengan Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme Di Indonesia (2002-2008). *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(2), 1–15.
- JawaPos. (2017, December 30). Bom Panci Meledak Pukul 21.00 Di Kampung Melayu, 3 Polisi Gugur. *JawaPos.Com*.
- Kemenlu. (2019). *Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/id/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-upaya-penanggulangan-terorisme
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Komitmen Bersama Lindungi Anak dari Terorisme dan Radikalisme*.
- Kompas. (2017, February 27). Awalnya Pelaku Ledakkan Bom di Taman Pandawa Bandung, Ini Kronologinya. *Kompas.Com*.
- Leatemia, M. F. (2019). KERJA SAMA PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME DI ASIA TENGGARA. *Jurnal Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1).
- Maksum, M. N. F. (2020). *Implementasi Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Bidang Keamanan: Studi Kasus Kerjasama PPAK-AUSTRAC dalam Menghadapi Terorisme*. Universitas Muhammadiyah Malang.

- Mansyur, G. M. (2016). *Stabilitas ASEAN dilihat dari Regional Security Complex Theory pada aspek Balance of Power*. 1406618833, 1–7.
- Mardiastuti, A. (2018). ASEAN-Australia Teken MoU Penanggulangan Terorisme Siber. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-3922209/asean-australia-teken-mou-penanggulangan-terorisme-siber>
- Monza, I. A., & Hartono, J. (2019, March 13). Kronologi Bom Sibolga dari Sore Hingga dini Hari. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1184649/kronologi-bom-sibolga-dari-sore-hingga-dini-hari>
- Muliana, R. P. (2018). Perang Internet (Netwar) Antara Indonesia Dengan Australia Pasca Penyesuaian Di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. In *Http://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/39782* (Issue 1).
- Nailufar, N. N. (2020). *Sejarah Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/06/160000769/sejarah-konfrontasi-indonesia-dengan-malaysia?page=all>
- Okezone. (2023). Peristiwa Hari Ini: Tragedi Bom Sarinah. *Okezone*.
- Pahlevi, R. M. R. (2020). Kerjasama Pemerintah Indonesia-Australia Menanggulangi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Akrab Juara*, 5(1), 85–95.
- Pamulatsih, H. Y., & Perwita, A. A. B. (2020). Bhayangkara and Platypus: The Cooperation between Indonesian National Police (Polri) and Australian Federal Police (AFP) in Dealing With Terrorism Threat in the Post of Lombok Treaty. *Indonesian Perspective*, 5(2), 119–137. <https://doi.org/10.14710/ip.v5i2.33957>
- Pemerintah Australia. (n.d.). *Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (2020-2024)*. <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/plan-of-action-for-the-indonesia-australia-comprehensive-strategic-partnership-2020-2024>
- Pemerintah Australia. (2017). *First Australia-Indonesia Cyber Policy Dialogue*. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade.
- Pemerintah Indonesia, P. A. (2018). *MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PENANGGULANGAN TERORISME DAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-

- Und. *Dpr* *Ri*, *I*(2), 1–15.
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.88.5042&rep=rep1&type=pdf>
<https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/73673>
<http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33646678859&partnerID=40&md5=3ee39b50a5df02627b70c1bdac4a60ba>
- Polhukam, H. K. (2021). *Menko Polhukam dan Mendagri Australia Perkuat Kerjasama Bidang Hukum dan Keamanan*. Polkam.Go.Id. <https://polkam.go.id/menko-polhukam-mendagri-australia-perkuat-kerjasama-bidang-hukum/>
- Polhukam, H. K. (2022). *Indonesia dan Australia Pimpin Pembahasan Anak Terdampak Terorisme*. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan.
- Polhukam, H. K. (2023). *Kerjasama dengan Australia, MENko Polhukam: Tekankan Terorisme Masih MENjadi Ancaman Laten*. Polkam.Go.Id. <https://polkam.go.id/kerjasama-dengan-australia-menko-polhukam-tekankan-terorisme-masih-menjadi-ancaman-laten/>
- Riza, B. (2003, December 10). Howard: Jumlah Korban Bom Bali Asal Australia 88 Orang. *Tempo.Co*.
- Ropi, I. (2016). Terorisme: Sebuah Persoalan Definisi. In J. Jahroni & J. Makruf (Eds.), *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model* (pp. 3–16). PPIM.
- SBS News. (2018). Woman stabbed man at home during alleged “IS-inspired attack.” *SBS News*. <https://www.sbs.com.au/news/article/woman-stabbed-man-at-home-during-alleged-is-inspired-attack/qe9c35znw>
- Setyaningrum, P. (2022). *Tragedi Bom Bali I: Kronologi, Jumlah Korban, Pelaku, dan Penyelesaian*. Kompas. <https://denpasar.kompas.com/read/2022/10/12/073615378/tragedi-bom-bali-i-kronologi-jumlah-korban-pelaku-dan-penyelesaian?page=all>
- Setyawati, S. M., & Agussalim, D. (2016). Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *19*(2), 111. <https://doi.org/10.22146/jsp.10848>
- Simanjuntak, S. (2016). ANALISIS KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM PENANGGULANGAN TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR (2002-2015) | Simanjuntak | *Journal of International Relations*. *Journal of International Relations*, *2*(3), 117–127. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/12262/11912>
- Sofwan, R. (2016, August 28). Pelaku Bom Medan Mengaku Diimingi Uang dan

